

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sistem keuangan nasional, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama yang menopang stabilitas sektor perbankan. Tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong masyarakat untuk menyimpan dana di bank serta menggunakan layanan perbankan secara aktif, yang pada akhirnya akan memperkuat fungsi intermediasi keuangan. Sebaliknya, ketika kepercayaan menurun, maka potensi *rush money* atau penarikan dana secara besar-besaran menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas sistemik, Siregar et al. (2024). Oleh sebab itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi variabel yang sangat penting untuk dijaga dengan baik.

Salah satu lembaga jasa keuangan yang sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat adalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memegang peranan penting dalam mendukung inklusi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan serta di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun dalam dua dekade terakhir, industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia menghadapi tantangan besar, seperti lemahnya manajemen risiko, kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian, hingga meningkatnya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak tahun 2006 hingga tahun 2024 telah terjadi penutupan terhadap 142 BPR/BPRS. Data tersebut merujuk pada informasi yang dipublikasikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di mana 38 di antaranya berlokasi di wilayah Jabodetabek. Meskipun penutupan bank dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, hal ini menimbulkan dampak psikologis negatif berupa menurunnya kepercayaan publik, termasuk terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) lain yang sebenarnya tidak mengalami masalah. Kekhawatiran masyarakat terkait keamanan simpanan mereka semakin meningkat, apalagi ketika informasi mengenai penutupan bank kurang transparan, serta edukasi mengenai perlindungan simpanan masih belum merata.

Dalam konteks tersebut, peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi semakin signifikan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui jaminan simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Karena itu, penelitian ini secara khusus akan menelaah hubungan antara peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) setalah adanya penutupan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hubungan ini sangat relavan untuk diteliti, mengingat masyarakat cenderung berhati-hati terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pasca penutupan, meskipun secara peraturan simpanan mereka dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Zhou et al., (2024), jaminan simpanan yang diberikan lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan instrumen penting untuk meredam kepanikan psikologis yang sering muncul pasca krisis perbankan, karena memberikan rasa aman kepada para deposan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Jan P. Nolte & Isfandyar Z. Khan, 2017), bahwa sistem penjaminan simpanan memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta membangun kepercayaan masyarakat, terutama pasca terjadinya kegagalan bank. Dalam konteks ini, kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia menjadi instrumen utama untuk melindungi dana nasabah BPR yang ditutup oleh OJK. Jurnal tersebut menekankan bahwa kesiapan operasional lembaga penjamin, khususnya dalam proses pembayaran simpanan secara cepat dan tepat, sangat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai simpanan mereka.

Selain itu, menurut penelitian Paper (2009), pendekatan pendanaan yang disarankan adalah sistem *ex-ante*, yaitu mekanisme pengumpulan dana cadangan sebelum terjadinya kegagalan bank. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dibandingkan sistem *ex-post* yang dilakukan setelah kegagalan terjadi. Selanjutnya, model analisis risiko seperti *Merton-Vasicek Credit Portfolio* yang diuraikan dalam jurnal tersebut memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memperkirakan kemungkinan kegagalan bank serta menentukan besaran kebutuhan dana cadangan yang ideal. Penerapan

model ini berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan sistem keuangan dalam menghadapi potensi krisis.

Temuan tersebut menegaskan peran strategis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, khususnya pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR), pasca intervensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa penutupan bank bermasalah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan teoritis dan praktis untuk menjelaskan pentingnya peran LPS dalam memulihkan serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem perbankan setelah terjadinya krisis.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, dengan mandat utama menjamin simpanan nasabah dan menangani resolusi bank yang mengalami kegagalan. Saat ini, LPS menjamin simpanan dengan batas maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank, dengan syarat yang dikenal sebagai prinsip 3T, yaitu simpanan harus tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank ataupun terindikasi fraud. Meskipun secara regulasi sudah memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas LPS dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR pasca penutupan bank masih belum sepenuhnya terukur secara empiris. Menurut Suhardiono (2025) sistem penjaminan simpanan di Indonesia terbukti membantu memulihkan stabilitas setelah krisis ekonomi 1998. Namun demikian, sistem ini juga menghadapi tantangan berupa potensi moral hazard, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur klaim penjaminan simpanan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Isnaeni, 2018) menekankan bahwa hak atas informasi dan perlindungan nasabah merupakan kunci penting untuk mencegah kerugian pribadi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. kondisi ini belum didukung oleh tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih tergolong sedang. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 oleh OJK, menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai sebesar 66,46 %, dan indeks

inklusi keuangan 80,51 %. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 66,43 % dan indeks inklusi keuangan 75,02%. Akibatnya, meskipun LPS telah memberikan jaminan simpanan, masih banyak masyarakat yang meragukan keamanan dana mereka saat terjadi penutupan bank, terutama pada industri BPR. Di samping menghadapi tantangan kepercayaan, industri BPR kini juga menghadapi disrupti teknologi keuangan (fintech). Fintech yang menawarkan layanan keuangan digital dengan proses cepat, fleksibel, serta biaya rendah mulai merebut pangsa pasar BPR, khususnya di wilayah perkotaan yang masyarakatnya semakin melek teknologi. Persaingan ini menyebabkan posisi BPR semakin tertekan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang dinamis dan perubahan perilaku masyarakat yang kini lebih memilih layanan digital. Sementara itu, jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data dari daftar likuidasi yang dipublikasikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menurun dari 1.643 BPR pada tahun 2014 menjadi 1.356 pada tahun 2024, mencerminkan adanya konsolidasi, merger, atau pencabutan izin usaha akibat ketidakmampuan memenuhi ketentuan manajemen risiko, persyaratan permodalan, atau standar operasional yang ditetapkan regulator.

Dalam konteks inilah, menjadi sangat penting untuk mengkaji bagaimana peran LPS secara nyata memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR, terutama setelah terjadi penutupan bank oleh OJK. Masalah ini sangat relevan, mengingat BPR memiliki peran krusial dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM, memperluas inklusi keuangan, serta melayani masyarakat di daerah yang belum terjangkau bank umum skala besar. Namun, penutupan BPR oleh OJK dapat berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat, memicu kekhawatiran, dan menurunkan kepercayaan terhadap BPR secara keseluruhan. Dalam hal ini, LPS memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan masyarakat melalui skema penjaminan simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Berdasarkan berbagai paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR pasca penutupan bank oleh OJK. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perbankan di Indonesia, khususnya dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menjaga stabilitas sektor perbankan mikro serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti memilih judul penelitian **“Pengaruh Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Perekonomian Rakyat Pasca Penutupan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Uraian mengenai permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah yang telah telah dipaparkan sebelumnya, yaitu :

1. Apakah peran Lembaga Simpanan (LPS) berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pasca penutupan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Apakah strategi komunikasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pasca penutupan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pasca penutupan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Menganalisis pengaruh strategi komunikasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pasca penutupan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam literatur keuangan terapan, khususnya dalam memahami pengaruh peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada BPR pasca penutupan bank. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan awal bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada stabilitas keuangan dari perspektif persepsi publik.

### 2. Manfaat Praktis

Bagi pihak LPS, OJK, dan pelaku industri BPR, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji efektivitas strategi komunikasi dan mekanisme penjaminan yang telah dijalankan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun pendekatan komunikasi risiko dan sosialisasi publik yang lebih terarah.

### 3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembuat kebijakan, khususnya regulator sistem keuangan, dalam merancang kebijakan yang mendukung memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan mikro, termasuk evaluasi atas batas jaminan, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen.

### 4. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan pengalaman penelitian langsung kepada penulis dalam menerapkan metode kuantitatif berbasis survei, mengelola data primer, dan melakukan analisis keuangan secara empiris. Hal ini mendukung penguatan kompetensi lulusan D4 Analisis Keuangan dalam melakukan riset terapan.

## 5. Manfaat bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang lebih baik tentang peran LPS dalam menjaga simpanan nasabah, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan dalam pengambilan keputusan finansial yang rasional dan aman.

## 1.5 Batasan Masalah

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jabodetabek dimana pada tahun 2006 hingga tahun 2024 telah terjadi penutupan terhadap 142 Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah di wilayah Jabodetabek.
2. Penelitian ini melibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan yang mengetahui tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

## 1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan pentingnya peran LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPR, khususnya setelah terjadinya penutupan bank oleh OJK. Selain itu bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Teori-teori ini lanjutan mengenai dasar penelitian antara lain teori kepercayaan, teori peran lembaga penjaminan, dan teori regulasi keuangan. Selanjutnya kan menjelaskan tentang LPS dan BPR, serta hipotesis penelitian.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, teknik pengumpulan data, serta instrumen yang digunakan.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dari pengumpulan dan analisis data, serta gambaran umum responden, deskripsi data, serta hasil analisis yang dikaitkan dengan teori dan temuan terdahulu. Pembahasan ini juga difokuskan pada temuan yang menunjukkan sejauh mana peran LPS memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR pasca penutupan bank oleh OJK.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, masukan dan saran-saran yang ditunjukan bagi pihak-pihak terkait seperti BPR maupun penelitian selanjutnya.